

SETNAS OGI MENYELENGGARAKAN MAIN EVENT OPEN GOVERNMENT WEEK 2023



MAY 16, 2023



MAIN EVENT OG WEEK 2023: CO-CREATE, COLLABORATE, CONTRIBUTE

Jakarta (16/5) – Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) menyelenggarakan Main Event atau Puncak Acara dari Open Government Week (OG Week) 2023 di Ruang Rapat BSM, Gedung Bappenas. Sebagai salah satu negara anggota OGP, Indonesia turut menyelenggarakan rangkaian kegiatan OG Week untuk tahun 2023 dengan total 10 acara sebagai hasil ko-kreasi dengan mitra pelaksana dari unsur Kementerian/Lembaga (K/L) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Rangkaian acara OG Week 2023 telah dilaksanakan sejak tanggal 10 Mei 2023 dan sebagai bentuk puncak acara dalam rangkaian kegiatan OG Week, maka pada tanggal 16 Mei diselenggarakan Puncak Acara dengan bentuk diskusi panel. Diskusi Panel diselenggarakan dengan menghadirkan berbagai perwakilan K/L, masyarakat sipil, akademisi, serta perwakilan pemuda. Kegiatan akhir sebagai puncak acara ini memiliki fokus untuk membahas refleksi dari implementasi nilai ko-kreasi dalam keterbukaan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berdampak dengan mengusung tema co-create, collaborate, contribute.

Jakarta - (10/3) – Open Government Indonesia National Secretariat held a Main Event of the Open Government Week 2023 at BSM Meeting Room, Bappenas. As one of OGP members, Indonesia also co-organizing a series of events in Open Government Week 2023 with total 10 events as a co-creation with OGI's partner from Ministries/Bodies (K/L) and Civil Society Organizations (CSOs). The series of OG Week 2023 has been held from May 10th 2023 and as a form of main event from the series of events in OG Week 2023, in May 16th the main event was held with a form of panel discussion. Panel discussion was held by presenting various representatives from Ministries/Bodies, Civil Society, Academicians, and Youth representative. The main event as a highlight of the event with a theme co-create, collaborate, contribute has a focus on reflecting co-creation values in open government implementation to actualizing impactful national development.

Dalam puncak acara OG Week 2023, Sekretariat OGI mengundang beberapa pemangku kepentingan untuk hadir sebagai pembicara kunci. Kegiatan ini dibuka dengan pemaparan Laporan Pelaksanaan OG Week 2023 yang dipaparkan oleh Bapak Priyanto Rohmattullah selaku Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan OG Week 2023 berhasil menghadirkan lebih dari 1000 peserta offline dan online dengan 53% peserta perempuan dan 47% peserta laki-laki. Adapun rangkaian kegiatan side event OG Week 2023 diselenggarakan bersama 3 K/L dan 12 OMS. Tema kegiatan juga sangat bervariasi mulai dari perlindungan hukum bagi kelompok rentan, perempuan, dan pembela lingkungan, keterbukaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta aksesibilitas digital bagi penyandang disabilitas. Adapun beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan OG Week yaitu, pertama, penandatanganan MoU antara LKPP-ICW-IAPI tentang Keterbukaan Pengadaan Barang dan Jasa. Kedua, rekomendasi kebijakan perlindungan hukum bagi pembela lingkungan untuk aparat penegak hukum. Ketiga, percepatan penyediaan aksesibilitas digital bagi penyandang disabilitas. Keempat, mekanisme perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

Sambutan kunci pertama dibuka oleh Bapak Bogat Widyatmoko selaku Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas yang memaparkan topik mengenai urgensi keterbukaan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional.

In OG Week 2023 Main Event, OGI National Secretariat inviting several stakeholders to be a keynote speaker. This event was opened with the presentation of the OG Week 2023 Implementation Report presented by Mr. Priyanto Rohmattullah as the Director of State Apparatus and Bureaucratic Transformation of the Ministry of National Development Planning/Bappenas. OG Week 2023 has successfully presenting more than 1000 participants both offline and online, with a percentage of 53% female participants and 47% men participants. The series of events. Moreover, the series of OG Week 2023 side events has been held with a collaboration with 3 Ministries/Bodies and 12 CSOs. The theme of OG Week events also varies widely, ranging from legal protection for vulnerable groups, women, and environmental defenders, transparency of government procurement of goods and services, and digital accesibility for person with disabilities. The output that has been made from the OG Week, namely, first, the signing of Memorandum of Understanding between LKPP-ICW-IAPI regarding Transparency on Government Procurement of Goods and Services. Second, a policy recommendations regarding legal protection for environmental defender for law enforcers. Third, the acceleration of providing digital accesibility for person with disabilities. Fourth, the legal protection mechanism for vulnerable groups.

The first keynote speech was opened by Mr. Bogat Widyatmoko as Deputy of Politics, Law, Defense and Security Ministry of National Development Planning/Bappenas which presented the topic regarding the urgency of open government in actualizing national development

Disampaikan bahwa harus ada arah perubahan untuk meninggalkan paradigma lama menuju paradigma baru dengan memastikan seluruh pemangku kepentingan tidak saja bersinergi tetapi juga melakukan ko-kreasi dan kolaborasi. Masyarakat harus menjadi bagian yang paling penting dari seluruh aktivitas pembangunan, hal ini yang menjadikan OGI sangat relevan dalam seluruh kegiatan untuk memastikan tujuan pembangunan dan tujuan bernegara. Hal ini karena nilai-nilai dari OGI yang berupa transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusivitas, dan inovatif diimplementasikan dalam proses ko-kreasi masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan praktik baik keterbukaan pemerintah.

Berikutnya ialah sambutan kunci dari Bapak Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang memaparkan topik mengenai implementasi nilai-nilai keterbukaan pemerintah untuk mewujudkan negara Indonesia bebas korupsi. Korupsi menjadi penyakit karena keremang-remangan disebabkan adanya ketidakpastian dan kurangnya akuntabilitas, oleh karenanya pemerintahan yang transparan dibutuhkan untuk adanya akuntabilitas. Pemerintahan yang terbuka merupakan prasyarat pemerintah dapat melayani masyarakat dengan kepastian, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya open government akan memberikan harapan Indonesia dapat bebas dari korupsi sehingga tujuan bernegara terlaksana dengan optimal.

Sambutan kunci diberikan pula oleh Ibu Jaleswari Pramodhawardani selaku Deputy V Kantor Staf Presiden yang memaparkan narasi topik mengenai komitmen pemerintah dalam mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam mewujudkan Indonesia emas 2045.

It was conveyed that there must be a change of direction to leave the old paradigm to the new paradigm in order to ensure all stakeholders not only in form of synergized but also co-create and collaborate. Public must be the most important part in all development activities, this thing is what makes OGI became really relevant in all activities that ensure to reach development goals and state goals. This is because OGI's values which are transparency, participation, accountability, inclusivity, and innovative are implemented in public and government co-creation process to actualizing a best practice in open government.

Next is the keynote speech from Mr. Nurul Ghufron, Deputy Chairperson of the Corruption Eradication Commission (KPK) who explained the topic about implementing open government values to create Indonesia free-of-corruption. Corruption become a disease because it is dim due to the uncertainty and lack of accountability, therefore a government that is transparent is needed to present accountability. Open Government is a prerequisite for the government to be able serve the public with certainty, transparency, and accountable. The existence of open government therefore could give an outlook for Indonesia to become free of corruption, so that the goals of states can be carried out optimally

Keynote speech also be presented by Ms. Jaleswari Pramodhawardhani as Deputy V of Executive Office of the President of Republic Indonesia, which present a narrative topic regarding the government's commitment to encourage transparency and public participation in realizing the Golden Indonesian vision 2045

Berdasarkan data Government Effectiveness Index yang paling terbaru, efektivitas pemerintah di Indonesia terus mengalami perbaikan dengan nilai 65,38 dari skala 100. Selain indeks tersebut, pemerintah juga memperhatikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai salah satu indikator dalam bidang tata kelola pemerintah dan pemberantasan korupsi. Capaian IPK kita pada tahun 2022 yang menurun harus menjadi evaluasi dan koreksi bersama seluruh jajaran pemerintah, terutama terkait belum baiknya persepsi tentang pencegahan korupsi dalam konflik kepentingan, suap dalam memulai bisnis dan investasi, serta integritas dari aparat penegak hukum.

Ibu Jaleswari menambahkan, bahwa arahan Bapak Presiden terhadap indeks tersebut sudah jelas dan tegas bahwa komitmen pemerintah terhadap upaya perbaikan tata kelola pemerintah dan upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah surut. Hal ini terefleksi melalui upaya pemerintah dalam mendorong transparansi dan partisipasi publik melalui tersedianya penyederhanaan perizinan melalui OSS, digitalisasi pengadaan melalui e-katalog, dan penyediaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Open Government telah memperkuat relevansinya untuk terus mendorong seluruh elemen pemerintah dengan memastikan terjadinya meaningful participation dan ko-kreasi dengan non-state actor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Komitmen ini akan didorong dengan dua strategi utama, yaitu perluasan partisipasi publik dalam pengawasan program pemerintah dan percepatan transformasi digital pemerintah.

Based on the newest Government Effectiveness Index, the government effectiveness in Indonesia continues to improve with a score 65.38 on a scale of 100. Other than the Government Effectiveness Index, the government has also paying attention to the Corruption Perception Index (CPI) as one of indicators on scope of governance and the eradication of corruption. Our declining CPI achievements in the year 2022 must be evaluated and corrected along with all levels of government, especially related to the lack of good peception about corruption in conflict of interest, bribes in business and investment, as well as the integrity of law enforcement officials.

Ms. Jaleswari also added, the directives of our President on the index was firm and clear that government commitment towards the governance of government and the effort to eradicate corruption will never be subside. This thing reflected through the government's effort to encourage transparency and public participatin through the provision of simplified permits with OSS, the digitalization of procurement through e-catalog, and the provision of e-government. Open government has strengthened its relevance to continue encourage all elements of government by ensuring meaningful participation and co-creation between non-state actor and government. This commitment will be driven by two main strategies, first expanding public participation in monitoring government's program and accelerating government digital transformation.

Selanjutnya, sambutan diberikan oleh Ibu Diah Natalisa selaku Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan topik penguatan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat memiliki kedudukan penting dalam pelayanan publik karena mendorong tercapainya tujuan ke-16 SDGs yakni mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan. Strategi yang dapat dilakukan ialah dengan menyediakan pelayanan publik yang representatif yang memenuhi kebutuhan serta ekspektasi masyarakat, dimulai dengan penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat, penyelenggaraan forum konsultasi publik, dan pengembangan SP4N-LAPOR!. Praktik baik di negara lain dapat kita lihat pada pengembangan platform partisipasi publik di Singapura melalui platform Ideas! dan Estonia melalui platform Rahvakogu.

Sambutan kunci berikutnya diberikan oleh Bapak Agus Pramusinto selaku Ketua Aparatur Sipil Negara dengan tema manifestasi Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas. ASN memiliki posisi strategis sebagai perumus, pelaksana kebijakan, sekaligus penyedia layanan publik. Dari sisi profesionalisme, dibutuhkan ASN yang mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan zaman yang serba digital. Selain kompetensi, dibutuhkan juga ASN yang memiliki orientasi untuk pelayanan publik yang dapat mencari solusi dan melayani untuk memajukan kinerja pembangunan.

Furthermore, remarks were given by Ms. Diah Natalisa as Deputy of Public Services at the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform with a topic of strengthening public participation and accountability on accomplishment of public services. Public participation has an important position in public services as it encourages the achievement of the 16 SDGs goals, namely developing effective, accountable, and transparent institutions. The strategy that can be implemented is to provide representative public services that meet the needs and expectations of the community, starting with conducting public satisfaction survey, organizing public consultation forum, and developing SP4N-LAPOR!. The good practices in other countries in terms of the development of public participation can be seen through Ideas! platform in Singapore and Rahvakogu platform from Estonia.

The next keynote speech were given by Mr. Agus Pramusinto as Chair of the State Civil Apparatus with a theme of manifesting a State Civil Apparatus that has professionalism and integrity. State Civil Apparatus has a strategic position as a formulator, policy implementer, as well as public services provider. In terms of professionalism, State Civil Apparatus who are knowledgeable and has skills are much needed, in accordance with the demands of the digital era. Other than competency, State Civil Apparatus who also have an orientation to public services is also needed, they are the one who can find solutions and serve the public with a good manner in order to advance the development performance,

Sambutan kunci terakhir disampaikan oleh Bapak Danang Widoyoko selaku Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia dengan tema peran masyarakat sipil dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Transparansi harus dimaknai lebih luas bukan hanya membuka informasi tetapi keterlibatan masyarakat yang lebih luas karena seringkali transparansi dimaknai hanya sebatas digitalisasi. Semangat ko-kreasi juga harus disisipkan dalam memaknai transparansi, sehingga pemerintah yang terbuka tidak hanya transparan tetapi juga melibatkan masyarakat.

Setelah acara dibuka dengan sambutan kunci, dilanjutkan oleh materi dari para narasumber. Pertama, Bapak Yudhistira Nugraha selaku Direktur dari Jakarta Smart City (JSC) sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki visi mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk memaksimalkan pelayanan publik. Bapak Yudhistira memaparkan bahwa smart city terbentuk dari 3 pondasi yakni partisipasi, engagement, dan kolaborasi dengan tujuan membangun ekosistem dan bukan project. Untuk menyediakan ekosistem yang sustainable, dibutuhkan partisipasi masyarakat. Pada masa pandemi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan platform digital berupa JAKI yang berorientasi user-sentris bukan government-sentris. Platform ini dapat digunakan untuk melapor dan memberikan respon tanpa mempertimbangkan adanya jam operasional atau otomatis bekerja 24 jam secara penuh. Terdapat 3 (tiga) best practices partisipasi masyarakat sipil yang telah dibangun JSC: (1) membangun sistem cepat merespon masyarakat melalui JakLapor, (2) membangun ekosistem kolaborasi sosial berskala besar, (3) membangun Jakarta future city hub.

The last keynote speech was delivered by Mr. Danang Widoyoko as Secretary General of Transparency International Indonesia with a theme of the role of civil society promoting government transparency and accountability. Transparency must be interpreted more broadly not only by disclosing information but by involving the wider community because transparency is often interpreted only as digitalization. The spirit of co-creation must also be embedded in the meaning of transparency, so that open government is not only transparent but also involves public participation

After the event was opened by several keynote speech, the event was continue by presentation of materials from the speakers. First, Mr. Yudhistira Nugraha as the Director of Jakarta Smart City (JSC), a Regional Public Service Agency (BLUD), whose vision is to optimize the use of technology to maximize public services. Mr. Yudhistira explained that a smart city is formed from 3 foundations, namely, participation, engagement, and collaboration with the aim to build an ecosystem and not a project. To provide a sustainable ecosystem, public participation is needed, during the pandemic the Government of DKI Jakarta developed a digital platform which is JAKI that is user-centric and not government-centric. This platform can be used to report and respond regardless of operating hours or fully automatic 24 hours working hours. There are 3 (three) civil society participation best practices that have been developed by JSC: (1) building a quick response system through JakLapor, (2) building a large-scale social collaboration ecosystem, (3) building Jakarta future city hub

Tantangan dalam implementasinya ialah, pertama, kelembagaan dimana saat berbicara smart city pasti melibatkan banyak pihak, yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini ialah membangun kelembagaan yang lebih agile melalui JSC yang berbentuk BLUD. Kedua, ialah proses bisnis dan juga financing yang cukup fundamental untuk dapat diurai permasalahannya terlebih dahulu.

Materi kedua dibawakan oleh Bapak Suhono Harso Supangkat selaku Direktur Smart Cities and Communities Innovation ITB. Bapak Suhono menyatakan bahwa data selalu menjadi bagian penting dalam tatanan pemerintahan dan saat ini masyarakat bisa melakukan pengaduan di media sosial dengan menampilkan data dan fakta di lapangan. Oleh karenanya, menciptakan smart city adalah menciptakan ekosistem yang dibangun oleh data. Budaya dan mindset menjadi aspek penting bagi seluruh stakeholders dalam membangun proses ko-kreasi, oleh karenanya transformasi digital tidak hanya dimaknai sebagai transformasi ke dalam teknologi tetapi juga transformasi dalam memiliki digital mindset. Sebagai hasilnya, perumusan kebijakan pada akhirnya harus selalu dilakukan dengan berbasis data.

Materi terakhir dibawakan oleh Ibu Rina Prasarani selaku Ketua II Bidang Advokasi dan Peningkatan Kesadaran HWDI. Ibu Rina menjelaskan bahwa saat ini pelayanan publik masih memiliki banyak kekurangan dalam pelaksanaannya jika dikaitkan dengan target SDGs. Saran penguatan yang bisa dilaksanakan antara lain, mengubah cara pandang masyarakat terhadap kelompok disabilitas, melakukan diskusi, kolaborasi, sosialisasi kepada penyandang disabilitas, dan mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam perumusan dan pelaksanaan rencana aksi

The obstacle that faced in the implementation are, first the involvement of many parties when talking about the smart cities responsible institutions. The Government of DKI Jakarta has done build a more agile institution through JSC in the form of a BLUD. Second, business processes and financing are fundamental enough to solve the problem.

The second material was presented by Mr. Suhono Harso Supangkat as the Director of Smart Cities and Communities Innovation ITB. Mr. Suhono stated that data has always been an important part of the governance structure and currently public can make complaints on social media by displaying data and facts on the ground. Therefore, creating a smart city is creating an ecosystem built by data. Culture and mindset are important aspects for all stakeholders in order to build the co-creation process, therefore digital transformation is not only interpreted as a transformation into technology but also a transformation in having a digital mindset. As a result, policy formulation should be always a data-based policy.

The last material was delivered by Ms. Rina Prasarani as Chair II of the HWDI Advocacy and Awareness Raising Division. Ms. Rina explained that currently public services still have many deficiencies in their implementation when it comes and aligned to the SDGs targets. Suggestion for strengthening that can be implemented include changing the public perspective towards person with disabilities, holding discussions, collaboration, outreach to persons with disabilities, and involving persons with disabilities in the formulation and implementation of action plans